

1. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen. Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan.

Laba merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional dari suatu perusahaan. Laba juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan untuk memprediksi seberapa besar laba di masa yang akan datang. Informasi laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan.

Bagi pemilik saham dan investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis yang akan diterima melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan.

Terjadinya manipulasi terhadap laba yang dilakukan oleh pihak manajemen sebagai penyusun laporan keuangan, merupakan kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan, sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan menjadi

diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi.

Laporan laba rugi sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, diantaranya adalah pihak manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kebijakan dan keputusan yang diambil oleh mereka dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan terutama laba akan menentukan kualitas laba. Kualitas laba ini diduga dipengaruhi oleh faktor keberadaan manajemen laba dan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) dalam hal ini komposisi dewan komisaris dan komite audit.

2. POKOK BAHASAN

Berdasarkan latar belakang diatas, makalah ini akan membahas tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba suatu perusahaan.

3. TUJUAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para pemakai laporan keuangan dan para penyelenggara perusahaan dalam memahami mekanisme *corporate governance* serta praktek manajemen laba, sehingga dapat meningkatkan nilai dan kualitas perusahaan.

4. KAJIAN LITERATUR

Corporate Governance

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia (dalam Herwidayatmo, 2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI (2001:1) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu, FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Siallagan dan Machfoedz (2006) berpendapat bahwa, *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Sedangkan menurut Nasution dan Setiawan (2007), *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Unsur-Unsur dan Prinsip-Prinsip dalam *Corporate Governance*

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* atau OECD (dalam FCGI 2001:1), terdapat empat unsur penting dalam *corporate governance*, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD (dalam FGCI 2001:1) menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham;
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*;
4. Transparansi dan penjelasan;
5. Peranan dewan komisaris.

Menurut konsep *Corporate Governance* perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan membentuk:

1. *Board of Directors*, dengan syarat mereka bekerja *full time* dengan tidak boleh merangkap pekerjaan. Mereka mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan manajerial strategik perusahaan.
2. *Board of Commisionners (BOC)*, meliputi komisaris biasa dan komisaris independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama *Board of Commisionners* adalah mengawasi arah kepengusahaan dan jalannya perusahaan menurut prinsip-prinsip *Corporate Governance*.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Menurut FCGI (2001:5), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan yang dalam hal ini adalah pihak manajemen.

Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Tugas utama dewan komisaris adalah bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Didalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit dan komisaris independen. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *corporate governance*, dan mengadakan perubahan yang diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

Komite Audit

Rachmawati dan Triatmoko (2007) mengatakan bahwa, komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Komite audit beranggotakan komisaris independen, dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit dibidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan;
2. Hasil usahanya;
3. Rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Merekomendasikan auditor eksternal.
2. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu:
 - Surat penunjukkan auditor.
 - Perkiraan biaya audit.
 - Jadwal kunjungan auditor.
 - Koordinasi dengan internal audit.
 - Pengawasan dengan hasil audit.
 - Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.
3. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan.
4. Meneliti laporan keuangan (*Financial Statement*), yang meliputi:
 - Laporan paruh tahun (*Interim Financial Statement*).

- Laporan tahunan (*Annual Financial Statement*).
- Opini auditor dan *Management Letters*.

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu kebijaksanaan, dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang diperoleh dari pejabat dalam bidang akuntansi.

2. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya.
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan internal. Audit internal juga merupakan

kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengawasan, dan proses *Governance*.

Suaryana (2005) menjelaskan tugas komite audit meliputi:

1. Menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Menilai pengendalian internal.
3. Menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sedangkan menurut Nasution dan Setiawan (2007) komite audit memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Komisaris Independen

Menurut FCGI (2001:7), persoalan independensi muncul karena dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Persoalan independensi juga muncul dalam hal penggajian dewan komisaris. Kepemilikan saham yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi dewan

komisaris, karena pengangkatan posisi anggota dewan komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga.

Pada akhirnya, independensi dewan komisaris menjadi sangat diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham mayoritas ditambah kurangnya integritas serta kemampuan dewan komisaris. Oleh karena itu dibentuklah komisaris independen yang bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat kriteria khusus untuk menjadi komisaris independen. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang

komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*).

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan karena *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika *agent* dan *principal* memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keinginan yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham dengan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan *principal*.

Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak *agent* dan *principal* yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan *principal*.

Penyebab timbulnya manajemen laba akan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional)

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria:

1. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (*owner-manager*).
2. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (*non owners-manager*).

Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki kemampuan untuk memonitor. Ketika kepemilikan manajemen rendah, maka kemungkinan terjadinya manajemen laba akan meningkat. Manajemen laba lebih sering dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan, dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diharapkan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan Institusional

Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Investor institusional sebagai investor yang berpengalaman, lebih terfokus pada laba masa datang yang lebih besar dari laba sekarang. Investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang

terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan pihak manajemen.

Laba

Suaryana (2005) berpendapat bahwa, pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba juga dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Menurut Suwardjono (2005:463), kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomik akan menentukan kualitas laba akuntansi. Tabel berikut ini meringkas perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi.

Tabel 1

Perbandingan antara Laba Akuntansi dan Laba Ekonomik

Aspek Pembeda	Laba Akuntansi	Laba Ekonomik
Sudut pandang pemaknaan	Perekayasaan akuntansi, penyusunan standar, atau penyusunan statemen keuangan	Pemegang saham
Dasar pengukuran	Kos historis	Kos kesempatan, nilai pasar, nilai likuidasi
Pengertian "ekonomik"	Kelayakan ekonomik jangka panjang	Penilaian ekonomik jangka pendek
Makna depresiasi	Alokasi kos	Penurunan nilai ekonomik
Unit pengukur	Rupiah nominal	Daya beli
Sasaran pengukuran atau sifat laba	Laba uang/nominal	Laba real
Konsep dasar yang melandasi	Kontinuitas usaha, asas akrual	Likuidasi, nilai tunai
Fungsi aset	Sisa potensi jasa	Simpanan/sediaan nilai

Sumber: Suwardjono (2002:462)

Dalam Suwardjono (2005:463), laba merupakan tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu perioda yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomik kapital mula-mula (awal perioda). Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut:

1. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan atau individual, kelompok individual, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan.
2. Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu (perioda) sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir.
3. Perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan.

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi (Astuti, 2003). Sukartha (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya yang dilakukan manajer untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi tertentu. Selanjutnya, Sukartha berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba seperti berikut ini:

(a) Rencana bonus (*Bonus scheme*). Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.

(b) Kontrak utang jangka panjang (*Debt covenant*). Ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.

(c) **Motivasi politik (*Political motivation*)**. Ini menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah.

(d) **Motivasi perpajakan (*Taxation motivation*)**. Ini menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

(e) **Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)**. Biasanya CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

(f) **Penawaran saham perdana (*Initial public offering*)**. Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada publik, informasi keuangan yang dipublikasikan merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

(1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

(2) Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

(3) Menggeser periode biaya atau pendapatan.

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain, mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott (2003) dalam Isnanta (2008) dapat dilakukan dengan cara:

a. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

b. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Kualitas Laba

Tujuan utama dalam melaporkan laba adalah untuk membantu investor dan kreditor dalam memprediksi arus kas yang akan datang. Mayangsari dan Wilopo (2002) dalam Koesuma (2007) mengatakan bahwa pemilihan metode akuntansi tidak terbatas hanya pada unsur-unsur yang dapat mempengaruhi arus kas tetapi juga mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin pada laba perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan pengukuran kualitas laba untuk menilai keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Hodge (2003) dalam Koesuma (2007) mendefinisikan kualitas laba adalah tingkat perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan dengan laba yang sesungguhnya. Tingkat kualitas laba ditentukan melalui selisih antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Jika laba akuntansi mendekati laba ekonomi maka laba tersebut dapat dikatakan berkualitas. Angka laba akan lebih bermakna kalau laba tersebut mencakup perubahan kemakmuran (*wealth*) atau penciptaan nilai (*value creation*) sebagai hasil kinerja ekonomik suatu kesatuan usaha. Diharapkan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomik yang berarti bahwa perubahan laba akuntansi diharapkan merefleksikan pula perubahan ekonomik perusahaan. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor yang mungkin lebih berkepentingan dengan laba ekonomik.

5. PEMBAHASAN

***Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kualitas Laba**

Penerapan *corporate governance* telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik, maka

diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Tujuan utama dari perusahaan-perusahaan adalah meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan. Rendahnya kualitas laba akan dapat menyebabkan kesalahan pembuatan keputusan para pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan yang tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan dapat diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya.

Sesuai dengan kajian dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Sebagai pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Untuk itu, manajer harus berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.

Corporate governance terdiri dari kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki

akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

Komposisi dan ukuran dewan komisaris juga berpengaruh terhadap kualitas laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen. Makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris, dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini, membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kualitas laba dan kinerja perusahaan yang semakin menurun.

Komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan, juga mempunyai kecenderungan mempengaruhi kualitas laba. Karena anggota yang berasal dari luar perusahaan (bukan bagian dari para pemegang saham atau *stakeholders*), tidak akan merasa dirugikan apabila terjadi penyelewengan laba oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, ada baiknya jika anggota dari dewan komisaris memiliki beberapa personel yang berasal dari para pemegang saham atau *stakeholders*. Melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan masukan atau kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan adanya kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan yang berakibat pada buruknya kualitas laba.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Komite audit juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hasilnya dapat diindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki pengaruh positif pada laporan keuangan, yaitu:

1. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat.
2. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat.
3. Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka pengendalian terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Komite audit juga dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba dan Kualitas Laba

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan. Semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat dan cenderung menekan konflik keagenan. Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka kemungkinan terjadinya perilaku curang manajer akan meningkat. Manajemen laba biasanya lebih sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya sehingga laba jadi diragukan kualitasnya. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Institusi sebagai pemilik saham juga dianggap mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dan juga, perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara *principal* dan *agent*.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba yang dapat mempengaruhi kualitas laba.

6. SIMPULAN

Laba sebagai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan mengakibatkan pasar bereaksi. Reaksi pasar terhadap laba akan berbeda untuk perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* dan perusahaan yang tidak

menerapkan *Corporate Governance*. Mekanisme *Corporate Governance* yang dilakukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan. Selain itu, ukuran dan komposisi dewan komisaris dan struktur kepemilikan juga berpengaruh positif terhadap manajemen laba dalam perusahaan. Dewan komisaris yang lebih sedikit jumlahnya lebih efektif dalam mengurangi masalah keagenan dan tindak manajemen laba yang dapat berpengaruh pada kualitas laba.

Keberadaan komite audit dalam perusahaan ternyata dapat mengurangi perbuatan manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit sebagai pihak independen yang bertugas untuk memonitor proses pelaporan keuangan akan mengurangi gangguan dalam informasi laba, sehingga pasar diduga akan bereaksi lebih kuat atas informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan.

Mekanisme *Corporate Governance* terbukti mampu dan dapat membantu perusahaan mengendalikan pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba yang dapat mengurangi kualitas laba perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan yang ada di Indonesia menerapkan mekanisme *Corporate Governance* agar dapat mengendalikan tindak manajemen laba dan meningkatkan kualitas laba perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., 2002, Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi, *Lintasan Ekonomi* Vol. XIX. No.2. Juli.
- Astuti, Dewi Saptantinah Puji, 2003, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba di Seputar *Right Issue*, Surakarta.
- Boediono, Gideon S.B., 2005, Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur, SNA VIII, Solo, 15-16 September: 172-194.
- Chandra, A., 2003, Prinsip-Prinsip dalam Merancang Kebijakan *Good Governance* dalam suatu Organisasi, *Jurnal Usahawan*, No. 9, September: 15-19.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan), Jilid II, Jakarta.
- Herwidayatmo, 2000, Implementasi *Good Corporate Governance* untuk Perusahaan Publik Indonesia, *Jurnal Usahawan*, No. 10, Oktober: 25-32.
- Ilona, D., dan Zaitul, Hubungan Informasi Keuangan dan Mekanisme *Corporate Governance*, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Isnanta, R., 2008, Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Koesuma, Y., 2007, "Kualitas Laba dalam Indeks Saham LQ45" Kebijakan Akuntansi Terhadap *Earnings Management*, Surabaya: Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Nasution, M., dan Setiawan, D., 2007, Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar, 26-28 Juli.
- Rachmawati, A., dan Triatmoko, H., 2007, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan, Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar, 26-28 Juli.
- Siallagan, H., dan Machfoedz, M., 2006, Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan, Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23-26 Agustus.

- Suaryana, A., 2005, Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba, *Jurnal Akuntansi*, September: 147-158.
- Sukartha, I. M., 2005, Pengaruh Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial Pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi, Denpasar.
- Swardjono, 2005, *Teori Akuntansi; Perencanaan Pelaporan Keuangan*, edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Ujiyantho, M. A., dan Pramuka, B. A., 2007, *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan*, Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar, 26-28 Juli.

